



BOOK REVIEW

Mewaspada “Pembajakan” Demokrasi

Nuruddin Al Akbar

Program Pascasarjana, Jurusan Politik
Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada

Judul:

*Demokrasi: Ekspor Amerika Paling
Mematikan*

Penulis:

William Blum

Alih Bahasa:

Yendi Amalia & Yasmin Purba

Judul Asli:

*America's Deadliest Export: Democracy -The
Thruth About US Foreign Policy and
Everything Else*

Penerbit:

Bentang

Tahun Terbit:

2013

Tebal: 460 halaman

ISBN: 978-602-7888-09-8

Wacana Demokratisasi dunia secara *mainstream* dipandang sebagai hal yang positif dan patut didukung. Adalah William Blum yang mengajak untuk berpikir lebih jeli dan kritis dalam memahami wacana demokratisasi tersebut, terkhusus jika dipropagandakan oleh Amerika Serikat (AS) yang dianggap sebagai kampiun demokrasi. Realitas yang terjadi sebagaimana yang ditulis Blum ialah atas nama demokratisasi dunia, AS telah melakukan intervensi terhadap pemilihan umum yang demokratis tidak ruang dari tiga puluh negara (hal. 3). Realitas ini tentunya menimbulkan tanda tanya besar bahwa atas nama demokratisasi dunia, sebuah pemilihan umum demokratis di sebuah negara yang merepresentasikan kuasa rakyat di wilayah tersebut dapat digugat oleh intervensi asing (yakni AS).

Kritik tajam Blum terhadap intervensi AS di berbagai belahan dunia sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Sejumlah buku yang pernah ditulisnya seperti *Killing Hope: US military and CIA Intervention Since World War II*, *Freeing The World to Death: Essays on The American Empire* dan *Rogue State: A Guide to World's only Superpower* merupakan kritik terhadap AS, terkhusus kebijakan luar negerinya. Dalam sejumlah buku tersebut, Blum menegaskan bahwa kebijakan luar negeri AS sampai saat ini bermasalah bagi dunia, bahkan dapat disetarakan dengan tragedi Holocaust¹. Di antara buku Blum yang sarat dengan kritisme terhadap kebijakan luar negeri AS tersebut bahkan ada buku yang sempat menjadi fenomenal karena dibaca dan dipropagandakan oleh Osama Bin Laden yang notabene merupakan musuh dari pemerintah AS.

Apa yang membuat buku ini (Demokrasi Ekspor Amerika) berbeda dibandingkan karyanya yang lain ialah secara eksplisit memertanyakan mengenai netralitas wacana demokratisasi dunia yang sering kali disuarakan AS, di mana wacana demokratisasi dunia tidak lebih merupakan alat bagi AS

¹ Untuk memahami secara ringkas sejumlah karya William Blum seperti *Killing Hope* dan *Rogue State* salah satunya lihat, Jon B. Perdue, *The War of All the People: The Nexus*

of Latin American Radicalism and Middle Eastern Terrorism (Virginia: Potomac Books, 201), hal. 119.

untuk melegitimasi campur tangannya di berbagai negara, walaupun negara yang diintervensi tersebut sebenarnya tergolong demokratis. Sehingga berbeda dengan teorisasi demokrasi yang membayangkan adanya kuasa rakyat atas pemerintahannya (di sebuah negara), sehingga wacana demokratisasi dunia dibayangkan akan menransformasikan dunia menjadi lebih baik. Apa yang terjadi sesungguhnya adalah legalisasi kuasa asing (dalam hal ini AS) terhadap suatu negara, di mana ironisnya kuasa asing tersebut justru dianggap sebagai hal yang positif dan patut didukung karena berlindung di balik pewacanaan demokratisasi dunia.

Politisasi atau “Pembajakan” wacana demokratisasi dunia oleh AS dipaparkan dalam sejumlah bagian buku ini, semisal pada Bab tiga mengenai Irak. Sebuah kutipan dari Bush (yang saat itu menjabat sebagai presiden AS) menunjukkan bahwa salah satu alasan AS menginvasi Irak pada tahun 2003 ialah guna menumbuhkan demokrasi di wilayah Timur Tengah. Bahkan Bush menambahkan bahwa karena tujuan mulia itu (demokratisasi Timur Tengah) maka perang Irak layak disamakan dengan perang di Iwo Jima (hal. 57). Iwo Jima dikenang oleh rakyat AS sebagai salah satu titik balik keberhasilan AS memukul mundur pasukan Jepang saat perang dunia II. Padahal menurut Blum, sejatinya demokratisasi hanyalah kedok bagi AS untuk menguasai minyak Irak yang selama ini dimonopoli oleh rezim yang tidak bersahabat dengan AS. Salah satu bukti yang ditunjukkan Blum ialah adanya laporan dari LSM Platform di Inggris pada tahun 2005 berjudul *Crude Designs: The Rip-off of Iraq's Oil Wealth*, di mana laporan tersebut sampai pada kesimpulan sekitar 64% cadangan minyak Irak akan dieksploitasi oleh perusahaan multinasional (hal. 69). Tentunya perusahaan multinasional yang dimaksud ialah perusahaan yang diamini AS, sehingga jelas bukan alasan demokratisasi Timur Tengah yang dipedulikan AS tapi kepentingan nasional AS itu sendiri.

Fakta yang dipaparkan Blum sebenarnya mengingatkan akan slogan yang sama dipropagandakan oleh sejumlah negara kolonial di masa lalu seperti “beban orang kulit putih/*white man burden*” dan “misi memberadabkan/*civilizing mission*” yang terkesan indah, tapi pada hakikatnya melegitimasi penjajahan kolonialis.

Kesadaran kritis Blum terhadap wacana demokratisasi yang dipropagandakan AS tampaknya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman pribadinya menyaksikan intervensi AS pada sebuah negara di wilayah Amerika Latin, yakni Chili pada masa pemerintahan Allende. Pada saat itu Blum bekerja sebagai wartawan lepas dan sedang bermukim di Chili. Pemerintahan Allende yang dihasilkan dari pemilihan umum yang terbilang demokratis pada kenyataannya tidak luput dari intervensi AS melalui CIA. Intervensi AS tersebut berbuah pada penggulingan Allende dari kekuasaan dan penciptaan rezim yang lebih bersahabat dengan AS. Sejak saat itulah Blum memiliki ketertarikan untuk mendalami intervensi AS di berbagai belahan dunia, dan tentunya menumbuhkan sikap kritisnya terhadap pewacanaan demokratisasi dunia².

Patut pula disoroti adanya sejumlah pembahasan dalam buku ini terkait dengan tema terorisme ataupun komunisme. Jika diamati secara sekilas mungkin terkesan pembahasan tersebut tidak berhubungan dengan permasalahan “pembajakan” demokrasi oleh AS. Akan tetapi sejatinya jika dimaknai secara mendalam dua pembahasan tersebut saling terkait, yakni baik komunisme ataupun terorisme direpresentasikan sebagai antitesis dari demokrasi yang dipropagandakan AS. Dengan pewacanaan semacam itu sejatinya memberikan legalitas bagi AS untuk berposisi sebagai “orang baik” dan mendapatkan pembenaran untuk menumpas “musuh-musuh” demokrasi tersebut.

Konstruksi berpikir itulah yang coba digugat oleh Blum, seperti yang ia jelaskan

² Kisah ketertarikan Blum terhadap kajian politik luar negeri AS dapat dibaca secara lebih lengkap pada biografinya. Lihat, <http://williamblum.org/about/>

secara cukup mendalam mengenai persoalan terorisme. Persoalan terorisme hingga saat ini memang menjadi topik hangat karena adanya serangan teroris di berbagai belahan dunia, salah satunya yang fenomenal terjadi pada 11 September 2001 di AS. Blum berupa mendekonstruksi pandangan *mainstream* bahwa para teroris (seperti Al Qaeda yang anti AS) melakukan aksi karena penentangannya murni karena benci terhadap demokrasi AS yang didukung oleh doktrin agama tertentu. Menurut Blum motivasi para teroris tersebut lebih disebabkan kebijakan luar negeri AS di negara “para teroris” tersebut yang membuat mereka menaruh kebencian pada AS. Salah satu bukti yang diberikan Blum ialah respon pemerintah AS ketika beredar kontroversi pada tahun 2005 mengenai beredarnya foto-foto penyiksaan dan pelecehan para tahanan politik (di Guantanamo). Pemerintah AS yang diwakili pentagon menyatakan tidak sepatutnya foto-foto tersebut beredar karena akan membakar aksi anti AS dan memantik aksi terorisme di luar negeri (hal. 19). Blum memberikan penjelasan kritis dari pernyataan Pentagon tersebut bahwasanya secara jelas AS mengakui tindakan mereka sendiri yang mengakibatkan “para teroris” atau “calon teroris” memiliki kebencian yang mendalam kepada AS.

Dekonstruksi Blum menjadi penting karena menjadikan AS sebagai pelaku terorisme yang berkedok demokrasi, sehingga posisi AS bukan sebagai “orang baik” yang sah melakukan serangan kepada “teroris” tetapi berubah posisi sebagai “orang jahat” yang “sah” untuk diserang oleh “para teroris anti AS”. Maka tidak heran dalam salah satu wawancara dengan *The Washington Post*, Blum berandai-andai jika ia menjadi Presiden maka ia dapat menghentikan aksi terorisme kepada AS dalam hitungan hari saja. Strategi Blum ialah meminta maaf pada korban dari kebijakan luar negeri AS yang dinyatakan Blum bermasalah³.

Pewacanaan *mainstream* bahwa AS merupakan musuh dari terorisme dan pejuang

demokrasi sejatinya juga dapat dijadikan legitimasi bagi AS untuk memosisikan negara yang anti atau kritis terhadap AS sebagai bagian dari kekuatan anti demokrasi bahkan pendukung terorisme. Sebuah istilah yang sering didengar di media mengenai keberadaan “poros setan/*axis of evil*” atau “negara pendukung terorisme/*state sponsored terrorism*” sebenarnya merupakan bentuk nyata penggunaan legitimasi demokrasi oleh AS untuk mendemonisasi negara lain. Kasus Irak menjadi contoh nyata bekerjanya model berpikir tersebut, di mana selain asalah demokratisasi Timur Tengah, Irak diposisikan sebagai negara yang mendukung terorisme dunia maka menjadi sah untuk “dilenyapkan” oleh AS sebagai “pejuang demokrasi dunia”.

Keunggulan dan Kritik

Terkait dengan tema besar yang diangkat Blum mengenai politisasi atau “pembajakan” demokrasi demi kepentingan AS, buku yang ditulis Blum ini terbilang mudah untuk dipahami dan kaya data. Semisal dalam kasus Irak, Blum mencoba mengetengahkan pernyataan sejumlah petinggi pemerintah AS seperti Bush yang menggunakan isu atau wacana demokrasi sebagai dalih untuk menginvasi Irak. Tidak berhenti sampai pewacanaan di kalangan pejabat, Blum juga berupaya mengidentifikasi tokoh non-pemerintah yang terlibat dalam pewacanaan semacam ini. Salah satu yang ia soroti misalnya pewacanaan dari kalangan akademisi seperti Thomas Friedman yang menyatakan perang Irak merupakan proyek demokrasi paling penting dan paling mulia sejak Marshall Plan yang dilakukan AS (hal. 61). Pewacanaan dari pihak non-pemerintah sedikit banyak tentu menyumbang tingkat kepercayaan publik bahwasanya isu demokratisasi memang benar-benar murni menjadi pijakan luar negeri AS sehingga layak untuk didukung.

Akan tetapi karya Blum ini tidaklah lepas dari kritik terkait dengan permasalahan data. Dalam salah satu bagian buku Blum yang menyinggung Komunisme, di mana komunis

³ Untuk mencermati lebih detail wawancara Blum dengan *The Washington Post*, lihat, <http://www.washingtonpost.com/wp->

[dyn/content/article/2006/01/20/AR2006012001971_2.html](http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/01/20/AR2006012001971_2.html)

merupakan antitesa dari demokrasi selain terorisme, dinyatakan oleh Blum sebagai murni konspirasi. Menurut Blum yang terjadi secara realitas ialah perseteruan antara orang-orang yang hidup dalam penderitaan (maksudnya rakyat dunia ketiga) dan ingin bangkit melawan kekuatan yang tidak ingin menjadikan mereka bangkit yakni AS dan sekutunya (hal.4). Pandangan Blum ini terbilang “berani”, karena secara *mainstream* dipahami pasca perang dunia II ada perseteruan antara dua blok raksasa yakni blok barat dipimpin AS dan blok Timur di bawah Uni Soviet. Berbagai perebutan kekuasaan bisa disaksikan secara jelas di sejumlah negara seperti semenanjung Korea (Perang Korea, di mana AS memihak Korea Selatan sementara Uni Soviet memihak Korea Utara), Vietnam (Perang Vietnam, di mana AS memihak Vietnam Selatan sementara Uni Soviet memihak Vietnam Utara), dan Afghanistan (Perang Afghanistan, di mana AS memihak gerilyawan Islam/Mujahidin sementara Uni Soviet memihak Pemerintahan Komunis Afghanistan). Sebuah bukti yang disodorkan oleh Blum untuk menggugat adanya ancaman Komunisme yakni masalah Tembok Berlin. Menurut Blum tidak benar bahwa tembok dibuat untuk mencegah pelarian rakyat Jerman Timur yang mencari kebebasan sehingga harus mempertaruhkan nyawa untuk membelot ke Jerman Barat dengan cara masuk ke wilayah Berlin Barat. Apa yang sebenarnya terjadi menurut Blum salah satunya ialah Jerman Barat ingin merekrut tenaga kerja terdidik dari Jerman Timur untuk bekerja di wilayahnya. Kebijakan Jerman Barat tersebut menimbulkan permasalahan besar di Jerman Timur yakni krisis tenaga kerja di Jerman Timur (hal. 257). Sebagai bukti Blum mengutip *New York Times* pada tahun 1963 yang menyebutkan Berlin Barat menderita secara ekonomi karena kekurangan tenaga kerja yang biasanya sekitar 60.000 pekerja melintas tapal batas dua negara untuk bekerja di Berlin Barat (hal. 258). Argumen Blum tersebut masuk akal, hanya saja tidak menjawab mengapa Berlin Barat dibagi menjadi dua bagian. Padahal secara jamak diketahui pemisahan Berlin sebagai konsekuensi dari tarik ulur kepentingan AS dan Uni Soviet di negara Jerman yang kalah perang dunia II.

Akan tetapi, lepas dari kritik tersebut, buku Blum telah membuka wawasan untuk tidak mudah terpesona dengan suatu gagasan atau pewacanaan yang tampaknya merupakan sesuatu yang baik seperti wacana demokratisasi dunia. Pewacanaan ini sejatinya telah “ditunggangi” oleh kepentingan AS untuk menancapkan hegemoninya di berbagai belahan dunia. Sikap kritis semacam ini sangat penting untuk memahami berbagai wacana lain yang juga pada hakikatnya memiliki maksud terselubung dalam konteks relasi antar negara. Sebagai contoh wacana *governance* yang menjadi *booming* di Indonesia hingga saat ini, sejatinya juga menyimpan bahaya terselubung jika tidak dilihat secara kritis, di mana dalam bayangan tradisional mengenai negara (yang didasarkan pada konsepsi negara Westphalia) yang diasumsikan berdaulat mengatur wilayahnya sendiri menjadi terkikis dengan penetrasi ide *governance* ke dalam wacana publik Indonesia secara umum. Poin penting dari *governance* ialah negara dibayangkan bukan sebagai aktor tunggal yang punya hak mengatur wilayahnya sendiri tetapi negara menjadi arena di mana ada relasi aktor-aktor yang berkepentingan untuk menjalankan negara. Dalam konsepsi baru ini, *governance* mengesahkan aktor bisnis, yang secara realitas bisa terwujud dalam berbagai perusahaan multinasional, untuk ikut serta menentukan “wajah” kebijakan sebuah negara karena posisinya yang sejajar dengan pemerintahan negara tersebut. Tentunya dalam konteks negara dunia ketiga seperti Indonesia, masuknya aktor bisnis multinasional dapat menimbulkan permasalahan serius apalagi ketika posisi pemerintah lemah, sehingga dampaknya apa yang terjadi saat ini seperti merebaknya pusat perbelanjaan/*mall* yang makin lama menggusur pedagang tradisional, atau negosiasi timpang yang dilakukan antara *freeport* dan pemerintah Indonesia yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak Indonesia. Maka sikap kritis terhadap suatu wacana yang tampak “indah” sebagaimana ditawarkan dalam buku Blum menjadi sebuah nilai penting dari buku ini yang menjadikannya layak untuk dibaca.

***Nuruddin Al Akbar** adalah mahasiswa Pascasarjana Jurusan Politik Pemerintahan UGM. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia meneruskan studi kuliah (S-1) di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) pada tahun 2008. Di antara Publikasi yang pernah ditulis ialah artikel “Gerakan Politik Calon Legislatif DPRD Kota Yogyakarta Menggunakan Supporter Sepakbola” dalam Bayu Dardias (ed.), “Praktik Penelitian Kualitatif : Pengalaman dari UGM”, Yogyakarta: JPP Press, artikel dalam jurnal berjudul “Jejaring Muhammadiyah (sebuah Analisis Recovery Bencana Merapi yang dilakukan oleh Organisasi Muhammadiyah)” dalam Jurnal Sosiologi Islam Vo. 2 No 2, Oktober 2012, dan artikel “Degradation of Westphalian Concept: Globalization of Knowledge and the Challenges of Epistemology Colonization (Case Study of Indonesia during New Order Era)” dalam Pribadi dan Zulfikar (ed.), *Proceeding International Conference of International System “The End of The Westphalian Settlement?”*, Yogyakarta: Gemini Publishing. Ia dapat dihubungi melalui nuruddin.alakbar@gmail.com.

